



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2107-2122

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemolisian dan Media:

### Dinamika Representasi dan Dampaknya pada Persepsi Publik

Fajar Kurniawan<sup>1✉</sup>, Angghi Muliya Ma'mur<sup>2</sup>, RR Roosita Cindrakasih<sup>3</sup>

(1,3) Universitas Bina Sarana Informatika, (2) Universitas Multimedia Nusantara

Email: [fajar.fuw@bsi.ac.id](mailto:fajar.fuw@bsi.ac.id)<sup>1✉</sup>

#### Abstrak

Pemolisian berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, namun representasi pemolisian di media massa dan media sosial sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap aparat kepolisian. Pemberitaan positif, yang menunjukkan keberhasilan polisi dalam menjaga keamanan, dapat memperkuat citra positif mereka, sementara pemberitaan negatif terkait kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memperburuk hubungan antara polisi dan warga. Artikel ini membahas bagaimana media, baik massa maupun sosial, membentuk representasi pemolisian di Indonesia, serta dampaknya terhadap persepsi publik dan reformasi kepolisian. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana konten media dan analisis framing terhadap pemberitaan di media massa dan media sosial. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi narasi yang dibangun oleh media terkait pemolisian serta pengaruhnya terhadap opini publik. Insiden kekerasan yang viral di media sosial menunjukkan pentingnya peran media dalam menuntut akuntabilitas dan perubahan dalam sistem kepolisian.

Kata Kunci: *Pemolisian, Media Sosial, Representasi, Kekerasan Polisi, Persepsi Publik*

## Abstract

Policing plays a key role in maintaining social order, but the representation of policing in mass and social media significantly shapes public perception of law enforcement officers. Positive coverage highlighting police success in ensuring security can enhance their image, while negative reports on police violence or abuse of power can damage public trust and worsen police-community relations. This article explores how mass and social media shape the representation of policing in Indonesia, examining its impact on public perception and police reform. The methodology used is qualitative research with a discourse analysis approach to media coverage in both mass and social media. This analysis aims to explore the narratives constructed by the media regarding policing and their influence on public opinion. Viral incidents of police violence on social media emphasize the critical role of media in demanding accountability and reform in the police system.

Keywords: *Policing, Social Media, Representation, Police Violence, Public Perception*

## PENDAHULUAN

Pemolisian adalah elemen fundamental dalam struktur sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melaksanakan hukum. Keberadaan polisi di setiap negara memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk menjaga ketertiban umum, mengurangi tingkat kriminalitas, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Meskipun demikian, meskipun polisi dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, citra dan persepsi publik terhadap mereka dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada bagaimana mereka digambarkan dalam media massa dan media sosial (Shaw, 1972).

Media massa, termasuk televisi, surat kabar, radio, dan kini media sosial, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk narasi tentang pemolisian. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas sosial. Dengan kata lain, media tidak hanya menginformasikan kejadian-kejadian yang terjadi, tetapi juga memberi makna terhadap peristiwa tersebut, yang kemudian membentuk persepsi masyarakat terhadap subjek yang diberitakan—dalam hal ini, polisi dan peranannya dalam masyarakat (Goffman, 1959).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak insiden kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang menjadi sorotan utama media. Kejadian-kejadian ini, sering kali dipublikasikan secara luas melalui media sosial dan media massa, yang memperburuk ketegangan sosial antara polisi dan masyarakat. Seperti yang telah terjadi dalam kasus-kasus besar di berbagai negara, terutama yang berhubungan dengan kelompok minoritas

atau warga yang terpinggirkan. Media memainkan peran utama dalam membawa isu-isu tersebut ke permukaan dan dalam mempengaruhi wacana publik (Thompson, 1995).

Framing media atau cara media membingkai peristiwa, misalnya, dapat memperburuk atau membangun citra polisi. Media yang secara rutin menyoroti insiden kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi akan memperkuat persepsi bahwa polisi sebagai lembaga cenderung otoriter dan menindas. Di sisi lain, pemberitaan yang mengedepankan kisah-kisah keberhasilan polisi dalam menjaga keamanan atau menyelesaikan masalah sosial tertentu dapat menciptakan citra polisi sebagai pelindung hukum yang diperlukan dalam masyarakat (Entman, 1993).

Media sosial, dengan sifatnya yang lebih cepat, dinamis, dan lebih terhubung langsung dengan masyarakat, telah menjadi platform yang lebih berperan dalam membentuk opini tentang polisi. Berbeda dengan media massa konvensional yang memiliki proses verifikasi dan pembatasan tertentu, media sosial memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dan lebih bebas dalam menyampaikan pandangan mereka, baik itu mendukung atau mengkritik polisi. Oleh karena itu, media sosial dapat berfungsi sebagai saluran penting dalam memperkuat atau mengubah persepsi publik terhadap pemolisian.

Penting untuk memahami bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk opini publik. Hal ini sejalan dengan teori agenda-setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972), yang menjelaskan bahwa media berperan dalam menentukan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Ketika media menyoroti masalah tertentu, mereka tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menentukan seberapa penting masalah tersebut dalam wacana sosial.

Representasi pemolisian dalam media adalah contoh nyata dari proses ini. Ketika media sering menyoroti kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh polisi, hal ini menambah bobot dari masalah tersebut dalam persepsi publik. Sebaliknya, ketika media lebih sering menampilkan citra positif polisi, misalnya dalam menjaga ketertiban atau melakukan pelayanan publik yang bermanfaat, hal tersebut akan memperkuat persepsi bahwa polisi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial yang menjaga keselamatan bersama.

Peran media massa dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap polisi juga sejalan dengan teori framing yang dijelaskan oleh Entman (1993). Framing ini berkaitan dengan cara-cara media memilih dan menyoroti bagian-bagian tertentu dari sebuah kejadian untuk membentuk cara pandang publik terhadap peristiwa tersebut. Dalam kasus pemolisian, media sering kali memberikan bobot lebih pada kejadian-kejadian yang mengarah pada

kritik terhadap polisi, seperti penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum atau ketidakadilan dalam penerapan hukum (Entman, 1993). Hal ini kemudian memperburuk persepsi masyarakat tentang polisi sebagai lembaga yang tidak adil dan otoriter.

Ketegangan sosial yang terjadi akibat pemolisian dan pemberitaan yang tidak seimbang di media dapat memperburuk hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap polisi sering kali timbul ketika publik merasa bahwa polisi tidak transparan atau tidak dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Insiden-insiden besar, seperti kekerasan polisi terhadap warga, yang sering diberitakan media, memperburuk citra kepolisian dan semakin memperuncing ketegangan sosial di masyarakat.

Misalnya, gerakan Black Lives Matter yang muncul di Amerika Serikat setelah insiden-insiden kekerasan oleh polisi terhadap orang kulit hitam. Gerakan ini mendapat dukungan besar melalui media sosial, yang memperlihatkan ketidakadilan yang terjadi dan memobilisasi massa untuk menuntut reformasi dalam sistem kepolisian. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media, terutama media sosial, dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial dengan mengangkat isu-isu yang sebelumnya terabaikan atau dikesampingkan oleh media mainstream (Tufekci, 2017).

Dalam konteks Indonesia, pemberitaan tentang tindak kekerasan oleh polisi dalam beberapa tahun terakhir—baik itu terhadap kelompok-kelompok tertentu atau dalam operasi-operasi yang kontroversial—juga menunjukkan bahwa media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik terhadap polisi. Apabila media memilih untuk menyoroti ketidakadilan yang terjadi, maka mereka tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran sosial yang mengarah pada perubahan sikap terhadap polisi.

Keberadaan media sosial telah menambah dimensi baru dalam dinamika ini. Berbeda dengan media massa tradisional, media sosial memberikan suara yang lebih beragam dari masyarakat luas. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk berbagi pengalaman atau sudut pandangnya mengenai pemolisian, baik melalui tweet, status Facebook, atau video yang diposting di YouTube. Kejadian-kejadian yang diliput oleh media sosial sering kali dapat viral dengan cepat, memperburuk ketegangan dan memperluas jangkauan kritik terhadap polisi.

Namun, media sosial juga membawa tantangan tersendiri. Informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak dapat diverifikasi dengan baik, yang bisa memperburuk keadaan dengan memperburuk stereotip atau memberikan informasi yang salah. Misalnya,

video kekerasan polisi yang dibagikan tanpa konteks yang jelas dapat memengaruhi opini publik secara negatif, meskipun tidak seluruhnya akurat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa media sosial dapat memperburuk atau memperbaiki persepsi masyarakat terhadap polisi, tergantung pada cara informasi disajikan dan diterima.

Ketegangan yang muncul akibat representasi pemolisian dalam media ini menjadi masalah yang sangat penting untuk dianalisis. Masyarakat yang terpolarisasi dan mencurigai polisi akan menciptakan lingkaran ketidakpercayaan yang semakin mengarah pada kekerasan sosial atau kesenjangan yang lebih dalam antara masyarakat dan institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana media membingkai dan menggambarkan pemolisian, serta dampaknya terhadap hubungan sosial di masyarakat.

Karena hal tersebut, pembahasan ini diambil untuk memahami bagaimana representasi pemolisian dalam media massa dan media sosial memengaruhi persepsi publik, serta untuk menganalisis implikasi sosial dan politik dari ketegangan yang muncul antara masyarakat dan aparat kepolisian.

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis konten media, khususnya analisis framing, untuk mengkaji bagaimana pemolisian digambarkan dalam media massa, termasuk media sosial dan berita online, serta dampaknya terhadap persepsi publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam representasi kompleks pemolisian dan dampaknya terhadap masyarakat, sesuatu yang tidak bisa hanya dipahami melalui angka statistik atau survei kuantitatif. Penggunaan analisis konten dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai peristiwa terkait pemolisian, seperti insiden kekerasan oleh polisi, diliput oleh media dan disampaikan kepada audiens (Gunawan, 2013).

Analisis Framing merupakan alat utama dalam mengkaji bagaimana media membentuk representasi sosial. Framing media dapat dilihat sebagai cara di mana media menyusun dan menyampaikan cerita kepada publik, dengan memilih aspek tertentu dari suatu peristiwa untuk menyoroti dan mengabaikan aspek lainnya. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus kekerasan oleh polisi, media dapat memilih untuk menyoroti kekerasan fisik yang terjadi atau justru fokus pada tindakan pahlawan polisi dalam menangani kejahatan. Pendekatan framing ini mengacu pada karya Hall et al. (1978) yang menunjukkan bagaimana media menciptakan krisis sosial seperti "mugging" atau perampokan dengan membingkai

narasi tertentu, yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aktor-aktor sosial tersebut (Hall, 1978). Dalam konteks pemolisian, framing media dapat memperkuat atau merusak legitimasi polisi di mata publik, seperti yang dijelaskan oleh Cohen dan Young (1973) yang menekankan bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi sosial (Young, 1973).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus insiden-insiden kekerasan oleh polisi yang diberitakan oleh media massa dan diungkapkan melalui platform media sosial dalam periode tertentu. Studi kasus ini memilih insiden kekerasan yang viral atau mencuat di media untuk menggambarkan bagaimana pemberitaan tersebut digambarkan oleh media dan dampaknya terhadap hubungan antara polisi dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Gitlin (1980) yang menekankan bahwa media memiliki peran penting dalam mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu, yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap institusi seperti kepolisian (Gitlin, 1980).

Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model-model efek media yang dikembangkan oleh Scheufele dan Tewksbury (2007). Mereka menjelaskan bagaimana media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga mengatur agenda dengan membingkai peristiwa tertentu dalam konteks narasi yang lebih besar. Framing ini dapat berfungsi untuk memperkuat atau meredakan ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat tindakan polisi yang kontroversial. Misalnya, pemberitaan mengenai kekerasan polisi yang dipertontonkan kepada publik melalui media sosial sering kali memicu diskusi publik dan bahkan demonstrasi, yang menciptakan tekanan terhadap institusi kepolisian untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel (Tewksbury, 2007).

Sebagai alat untuk menghubungkan teori dan praktik, penelitian ini juga merujuk pada karya Altheide (2000), yang membahas bagaimana media memiliki kekuatan untuk membentuk kebijakan publik melalui framing. Media tidak hanya berfungsi sebagai kanal informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mempengaruhi bagaimana kebijakan penegakan hukum, khususnya terkait kepolisian, dipersepsikan oleh publik. Melalui analisis framing ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai representasi pemolisian dalam media, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dan tindakan aparat penegak hukum (Altheide, 2004).

Secara keseluruhan, metodologi ini berfokus pada bagaimana media mengonstruksi realitas sosial terkait pemolisian dan bagaimana representasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita

mengenai hubungan antara media, pemolisian, dan perubahan sosial dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah data faktual terkait pemolisian di media, yang disusun berdasarkan laporan dan temuan dari berbagai sumber:

| Aspek                       | Data/Fakta                                                                                                                                                                                 | Sumber                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kekerasan oleh Kepolisian   | Sepanjang Juli 2022–Juni 2023, tercatat 622 peristiwa kekerasan melibatkan anggota Polri. Jenis kekerasan meliputi penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan pembubaran aksi secara paksa. | Tim KontraS (2023)                        |
| Pelanggaran HAM             | Pada 2022, Polri menjadi aktor utama pelanggaran HAM, termasuk kriminalisasi aktivis, penyiksaan, dan penghalangan akses bantuan hukum.                                                    | LBH Jakarta (2022)                        |
| Pelayanan Publik            | Polri menempati posisi ketiga instansi dengan laporan terbanyak terkait pelayanan publik (674 laporan).                                                                                    | Ombudsman RI (2023)                       |
| Pengaduan HAM ke Komnas HAM | Polri menjadi aktor yang paling banyak diadukan dengan 861 kasus terkait dugaan pelanggaran HAM pada 2022. Sementara tahun 2023 sebanyak 776 aduan.                                        | Komnas HAM RI (2022; 2024)                |
| Pemolisian Demokratis       | Belum sepenuhnya terwujud, sering kali polisi menjadi sumber ketidakamanan, termasuk dalam kasus korupsi, kekerasan fisik, dan pelanggaran hukum lainnya.                                  | Brianne McGonigle Leyh (2021); ICW (2024) |

Selain data yang disebutkan di atas, berikut tambahan informasi faktual terkait pemolisian di media dan dinamika sosial terkait (rentang tahun 2021-2024):

| Aspek              | Data/Fakta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reformasi Polri    | Survei Litbang Kompas (2022) menunjukkan 62% responden menilai reformasi Polri berjalan lambat, khususnya dalam isu transparansi dan akuntabilitas. Kemudian Survei Litbang Kompas terbaru yang dilakukan pada Mei-Juni 2024 menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, mencapai 73,1%. | Litbang Kompas (2022; 2024) |
| Kepercayaan Publik | Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri turun menjadi 54,2% pasca kasus Ferdy Sambo pada 2022. Kemudian                                                                                                                                                                                                           | Indikator Politik           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                       | survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepercayaan dan persepsi publik terhadap institusi penting menjelang Pemilu 2024. Salah satu hasilnya adalah apresiasi publik terhadap kinerja Polri, dengan 76,4% responden menyatakan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.                                                                                                                 | Indonesia (08/2022; 10/2023)                      |
| Pemberitaan Kekerasan | Sepanjang 2023, AJI mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pada saat meliput demo Kawal Putusan MK pada 22 Agustus 2024: <a href="#">AJI</a> dan LBH Pers mencatat setidaknya 11 jurnalis menjadi korban kekerasan oleh aparat keamanan.                                                                                                                       | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (2023; 08/2024) |
| Kasus Viral           | Istilah No Viral No Justice semakin kencang di masyarakat. Polisi dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga masyarakat harus membagikan kasus yang terjadi lewat sosial media untuk menuntut keadilan. Tahun 2024 tercatat ada 3 kasus yang mempertanyakan profesionalitas Polisi yaitu kasus, Vina di Cirebon, Afif Maulana di Sumatera Barat, dan penembakan siswa SMK di Semarang. | Tribun Jabar (2024)                               |

Data-data ini menunjukkan tren yang perlu ditelaah lebih lanjut, termasuk dalam kaitannya dengan persepsi publik dan pemberitaan media tentang pemolisian:

#### Pemberitaan Positif dalam Media Massa

Pemberitaan positif tentang pemolisian sering kali muncul dalam bentuk berita yang menonjolkan keberhasilan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pemberitaan ini, polisi digambarkan sebagai pelindung yang berperan aktif dalam menangani berbagai bentuk kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, dan narkoba, serta dalam operasi-operasi yang meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. Pemberitaan semacam ini bertujuan untuk memperkuat citra polisi sebagai pihak yang tegas dan mampu menangani situasi krisis dengan efektif. Dalam banyak kasus, keberhasilan polisi sering kali di-*highlight* dalam bentuk laporan tentang penangkapan pelaku kriminal yang berbahaya atau dalam upaya pencegahan kejahatan yang berhasil dilakukan.

Namun, pemberitaan positif semacam ini, meskipun penting untuk menjaga semangat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, juga memiliki beberapa kekurangan. Salah



satunya adalah kecenderungan untuk tidak mengungkapkan permasalahan struktural atau tantangan yang ada di dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Misalnya, meskipun polisi berhasil menanggulangi kejahatan, aspek terkait penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam penegakan hukum kerap tidak diberitakan. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik dalam sistem pemolisian, padahal dalam kenyataannya masih ada banyak masalah yang belum teratasi (Reiner, 2000).

Penelitian dari Alan Turing Institute juga mengungkapkan bahwa narasi media dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama jika dikaitkan dengan inovasi teknologi seperti prediksi kejahatan. Namun, sisi ini berpotensi membatasi diskusi tentang isu-isu mendasar seperti bias algoritmik atau kurangnya akuntabilitas teknologi yang digunakan (Camilleri, 2003).

Sementara sisi positif pemberitaan memperkuat citra polisi, ada risiko mengabaikan isu struktural dalam tubuh kepolisian. Artikel di *Policing: A Journal of Policy and Practice* menyebutkan bahwa narasi yang terlalu terfokus pada pencapaian dapat menciptakan kesenjangan antara harapan publik dan kenyataan operasional. Misalnya, liputan tentang kepolisian sering gagal menjelaskan potensi bias terhadap kelompok rentan atau implikasi hukum dan sosial yang lebih luas (Jeanis, 2021).

Liputan media yang berimbang dapat menjadi katalisator reformasi kepolisian. Ketika narasi publik mencakup aspek keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, hal ini mendorong institusi kepolisian untuk mengevaluasi kebijakan dan pendekatan mereka. Sebaliknya, liputan yang terlalu fokus pada keberhasilan cenderung mengurangi tekanan untuk melakukan perbaikan struktural. Sehingga, pemberitaan positif juga perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara menonjolkan pencapaian dan mengakui adanya masalah struktural yang perlu diperbaiki.

#### Pemberitaan Negatif dalam Media Massa

Sebaliknya, pemberitaan negatif mengenai pemolisian sering kali berfokus pada insiden-insiden kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Media, terutama dengan adanya perkembangan teknologi digital, memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi terkait kasus-kasus seperti penyalahgunaan wewenang oleh polisi, diskriminasi rasial, atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Insiden-insiden seperti yang terjadi pada kasus George Floyd di Amerika Serikat, yang menjadi viral melalui media sosial, telah menarik perhatian internasional dan mengundang protes besar-besaran di banyak negara. Pemberitaan tentang kekerasan polisi ini tidak hanya menyoroti

kekerasan itu sendiri, tetapi juga memperlihatkan ketegangan sosial yang muncul akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Salah satu dampak utama dari pemberitaan negatif ini adalah ketidakpercayaan yang berkembang di masyarakat terhadap polisi. Ketika media menyoroti kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh polisi, hal ini sering kali memperburuk hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberitaan negatif tidak hanya menyoroti tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial yang lebih besar, yang berkaitan dengan masalah keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Gunawan, 2023).

Secara keseluruhan, media memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum. Tetapi, pemberitaan yang tidak seimbang atau hanya fokus pada sisi negatif dapat memperburuk hubungan polisi dengan masyarakat, yang berisiko menghambat reformasi dan pemulihan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih objektif dan konstruktif dalam pemberitaan sangat penting untuk menciptakan perubahan yang positif dalam sistem kepolisian.

#### Pengaruh Representasi Media terhadap Persepsi Publik

Pemberitaan yang disampaikan oleh media massa memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana masyarakat memandang polisi dan sistem pemolisian. Media berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk persepsi (Lippmann, 1922). Pemberitaan positif yang sering kali menampilkan polisi sebagai pahlawan yang menegakkan hukum dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Hal ini diakui oleh banyak peneliti, yang menyatakan bahwa ketika media menggambarkan polisi secara positif, masyarakat cenderung melihat polisi sebagai figur yang terpercaya dan mampu menjaga keamanan publik. Oleh karena itu, pemberitaan tentang keberhasilan polisi dalam menangani kasus kejahatan atau pengamanan acara besar dapat memperkuat citra positif mereka.

Namun, meskipun pemberitaan positif penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap polisi, pemberitaan yang terlalu fokus pada sisi positif juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah menciptakan pandangan yang tidak realistis mengenai pemolisian. Ketika media hanya menyoroti keberhasilan tanpa membahas tantangan atau masalah dalam institusi kepolisian, hal ini dapat menutupi realitas yang ada di lapangan. Misalnya, ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bisa terabaikan karena pemberitaan yang tidak seimbang. (Ericson, 1987).

Pemberitaan yang lebih seimbang, yang mencakup baik pencapaian maupun masalah internal dalam kepolisian, lebih mampu menciptakan persepsi yang objektif dan konstruktif di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, pemberitaan negatif yang sering kali memfokuskan pada insiden-insiden seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan polisi, atau diskriminasi rasial juga memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik. Ketika media menyoroti insiden kekerasan polisi, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang viral melalui media sosial, hal ini dapat mengarah pada peningkatan ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemolisian.

Namun, penting juga untuk memahami bahwa pemberitaan negatif bukanlah hal yang selalu merugikan. Pemberitaan negatif dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendorong perubahan dalam sistem kepolisian. Dalam banyak kasus, pemberitaan tentang tindakan polisi yang tidak adil atau kekerasan oleh aparat penegak hukum telah memicu reformasi dan upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem kepolisian (Sklansky, 2007). Media dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menuntut akuntabilitas dari pihak berwenang. Sebagai contoh, banyak negara telah memperkenalkan reformasi di tubuh kepolisian sebagai respons terhadap pemberitaan negatif yang berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi (Reiner, 2004).

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pemberitaan negatif dapat memperburuk hubungan polisi dengan masyarakat, hal tersebut juga dapat menciptakan ruang untuk dialog dan perubahan konstruktif. Media sosial, misalnya, telah berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan polisi dan mendukung gerakan-gerakan sosial yang menuntut perubahan dalam kebijakan kepolisian (Fuchs, 2017).

Di Indonesia, media massa telah lama menjadi instrumen yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik tentang berbagai isu, termasuk pemolisian. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai dinamika yang berkaitan dengan praktik kepolisian, termasuk insiden kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum dan gerakan sosial yang menuntut perubahan dalam sistem kepolisian. Media massa, baik itu televisi, surat kabar, maupun media sosial, memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap polisi.

Pemberitaan positif di media sering kali menggambarkan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan menanggulangi kejahatan. Misalnya, dalam situasi pandemi COVID-19, banyak pemberitaan yang menyoroti polisi sebagai

bagian dari garda depan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan. Pemberitaan semacam ini dapat memperkuat citra polisi sebagai pelindung dan penjaga keselamatan publik. Namun, media juga sering mengabaikan kritik terhadap sistem kepolisian, yang bisa berakibat pada ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Sebagai contoh, meskipun polisi sering digambarkan secara positif dalam menangani kejahatan besar, ada juga ketidakadilan yang muncul, seperti diskriminasi dalam penegakan hukum, yang sering kali tidak mendapat perhatian media yang cukup.

Namun, pemberitaan negatif juga berpengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kepolisian di Indonesia. Insiden-insiden kekerasan polisi yang sering kali viral di media sosial telah menambah ketegangan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Media sosial di Indonesia, terutama Twitter dan Facebook, sering kali menjadi saluran untuk menyuarakan protes terhadap tindakan polisi yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemberitaan negatif ini bukan hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga pada tekanan publik terhadap institusi kepolisian untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka.

Dampak pemberitaan negatif tersebut sering kali menimbulkan ketidakpercayaan terhadap polisi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia cenderung lebih kritis terhadap kepolisian setelah diberitakan berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum. Ketidakpercayaan ini semakin meningkat setelah adanya laporan tentang penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum yang melibatkan polisi. Di sisi lain, pemberitaan positif yang lebih jarang disorot di media juga tidak sepenuhnya dapat memperbaiki citra kepolisian jika tidak diimbangi dengan transparansi dalam menangani keluhan dan pengaduan dari masyarakat.

#### Peran Media Sosial dalam Pembentukan Narasi Pemolisian

Media sosial memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk narasi tentang pemolisian dalam masyarakat modern. Platform ini memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan membuka ruang percakapan tentang isu-isu sosial, termasuk pemolisian. Salah satu kekuatan utamanya adalah memberikan suara kepada individu dan kelompok yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari media arus utama.

Contoh signifikan adalah penyebaran video kekerasan polisi seperti dalam kasus George Floyd di Amerika Serikat. Video tersebut viral, memicu diskusi publik, dan mempercepat gerakan sosial yang menyerukan reformasi kepolisian. Media sosial tidak

hanya mendokumentasikan peristiwa kekerasan polisi tetapi juga memberikan platform untuk membangun solidaritas dan advokasi reformasi sistemik (Meikle, 2016).

Namun, media sosial juga memiliki kekurangan, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks. Banyak informasi yang tersebar di media sosial sering kali tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang dapat memperburuk situasi ketegangan antara polisi dan masyarakat. Misalnya, beredarnya informasi palsu mengenai insiden tertentu dapat memicu ketakutan dan kebencian yang tidak beralasan terhadap polisi, tanpa adanya bukti yang jelas.

Di Indonesia, media sosial berfungsi sebagai alat yang sangat kuat untuk mempengaruhi wacana publik mengenai kepolisian. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap tindakan polisi, terutama terkait dengan kekerasan dan diskriminasi. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial memungkinkan berbagai insiden untuk dipublikasikan secara cepat, terkadang bahkan sebelum informasi terverifikasi sepenuhnya, yang dapat memperburuk citra polisi.

Salah satu contoh nyata adalah gerakan #IndonesiaTerserah, yang muncul setelah insiden kekerasan oleh aparat polisi terhadap masyarakat sipil. Gerakan ini mencerminkan bagaimana media sosial dapat menggerakkan opini publik dan menekan pihak berwenang untuk melakukan reformasi dalam kepolisian. Gerakan ini tidak hanya memberikan ruang untuk aspirasi masyarakat, tetapi juga memungkinkan terciptanya dialog yang lebih terbuka dan transparan mengenai pemolisian. Namun, meskipun media sosial memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas, ia juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah maraknya penyebaran hoaks atau informasi yang belum terverifikasi dengan baik, yang dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut antara masyarakat dan polisi. Ketidakpastian dalam kebenaran informasi sering kali memperburuk situasi. Selain itu, adanya akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial turut memperburuk polarisasi sosial, meningkatkan ketegangan antara polisi dan masyarakat (Papacharissi, 2011).

Namun demikian, peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai reformasi kepolisian tidak bisa dianggap remeh. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari pihak kepolisian secara langsung dan lebih cepat, yang sering kali mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Hal ini bisa dilihat dalam banyak kasus di Indonesia, seperti reformasi dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi, di mana tekanan yang datang dari media sosial berperan penting dalam mendorong perubahan-perubahan tersebut.

## KPI dan Berita Kekerasan di Televisi

Komisi Penyiaran Indonesia telah memiliki Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai acuan penayangan berita di media televisi. Dalam aturan ini berita-berita yang menampilkan kekerasan terutama pada pemberitaan terkait polisi yaitu mengenai kriminalitas sangat dijaga dengan adanya sanksi. KPI dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian program jika ada pelanggaran P3SPS tersebut. Sepanjang tahun 2024 ada 11 sanksi teguran program televisi. Namun tidak ada yang terkait dengan kasus polisi. KPI memberikan sebanyak 5 teguran kepada program berita atau jurnalistik karena terkait berita kriminal. (kpi.go.id).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menyoroti peran penting media dalam membentuk representasi pemolisian dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, di mana pemberitaan media—baik yang positif maupun negatif—secara signifikan memengaruhi persepsi publik terhadap aparat kepolisian. Pemberitaan positif, yang menggambarkan polisi sebagai pahlawan yang bekerja keras untuk menjaga ketertiban dan menanggulangi kejahatan, dapat memperkuat citra positif kepolisian. Namun, pemberitaan yang berfokus pada kekerasan oleh aparat atau penyalahgunaan kekuasaan cenderung menurunkan kepercayaan publik terhadap polisi dan meningkatkan ketegangan sosial. Kasus kekerasan oleh aparat kepolisian yang menjadi viral di media sosial, seperti yang terjadi pada 2023, menambah beban citra polisi di mata masyarakat. Media sosial, dengan cepatnya menyebarkan informasi, memberi ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar dari aparat kepolisian.

Pentingnya representasi yang seimbang dalam media menjadi sangat jelas, mengingat bahwa pemberitaan yang terlalu condong pada satu sisi—baik positif maupun negatif—dapat menciptakan distorsi dalam pemahaman masyarakat terhadap realitas yang ada. Media massa berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi tetapi juga sebagai alat pembentuk opini yang dapat memperburuk atau memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberitaan yang lebih objektif dan akurat sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi polisi serta kesalahan atau ketidaksempurnaan yang ada dalam sistem kepolisian itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam reaksi masyarakat

terhadap berbagai insiden yang melibatkan kekerasan oleh polisi. Kasus pembunuhan mahasiswa yang memicu protes besar-besaran dan gerakan reformasi menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran penting untuk memperjuangkan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, meskipun media sosial memiliki potensi untuk menyebarkan informasi yang salah atau hoaks, ia juga berfungsi sebagai platform untuk perubahan sosial, mendesak agar sistem kepolisian lebih responsif terhadap tuntutan publik.

Kesimpulannya, media—baik tradisional maupun sosial—memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk cara masyarakat memandang polisi. Representasi yang adil, seimbang, dan berbasis pada fakta menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Di sisi lain, media sosial juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut perubahan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Oleh karena itu, baik media massa maupun media sosial memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk narasi yang lebih konstruktif mengenai pemolisian dan masalah sosial yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Altheide, D. L. (2004). Media Logic and Political Communication. *Political Communication*, 21(3): 293–296.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Garden City, NY: Doubleday.
- Camilleri, H., Ashurst, C., Jaisankar, N., Weller, A., & Zilka, M. (2023). Media coverage of predictive policing: Bias, police engagement, and the future of transparency. In *Proceedings of the 3rd ACM Conference on Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization (EAAMO '23)* (Article 28, 1–19). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3617694.3623249>
- Cohen, S., & Young, J. (1973). *The Manufacture of News: Social Problems, Deviance, and the Mass Media*. Constable.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Ericson, R., Baranek, P., & Chan, J. (1987). *Visualizing deviance: A study of news*. University of Toronto Press.
- Fuchs, C. (2012). *Social media, politics, and society: The new media and social theory*. SAGE Publications.
- Gitlin, T. (1980). *The Sixties: Years of Hope, Days of Rage*. Bantam Books.

- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Doubleday.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Roberts, B. (1978). *Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order*. Macmillan Education.
- Jeanis, M. N., Muniz, C. N., & Molbert, C. L. (2021). Law enforcement and social media usage: An analysis of engagement. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 15(1), 570–583. <https://doi.org/10.1093/police/paz026>
- Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. Harcourt, Brace and Company.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Meikle, G. (2016). *Social media: Communication, sharing, and visibility*. Routledge.
- Papacharissi, Z. (2011). *A networked self: Identity, community, and culture on social network sites*. Routledge.
- Perlmutter, D. D. (2000). *Policing the media: Street cops and public perceptions of law enforcement*. SAGE Publications.
- Reiner, R. (2010). *The politics of the police*. Oxford University Press.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. *Journal of Communication*, 57(1), 9-20.
- Sklansky, D. (2007). *Democracy and the police*. Stanford University Press.
- Thompson, J. B. (1995). *The media and modernity: A social theory of the media*. Stanford University Press.
- Tuchman, G. (1978). *Making News: A Study in the Construction of Reality*. Free Press.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- Tribun Jabar. (2024) <https://jabar.tribunnews.com/2024/12/03/kaleidoskop-4-kasus-polisi-terjerat-pembunuhan-di-tahun-2024-terbaru-viral-polisi-bunuh-ibu-kandung?page=3>.